

**PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
PADA USAHAMIKRO KECIL DAN MENENGAH OLEH DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI PROVINSI RIAU DI KOTA
PEKANBARU PADA TAHUN 2018**

Oleh: Thasa Nadilla

Email : thasanadilla@gmail.com

Dosen Pembimbing: Dra, Hj. Wan asrida, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

ABSTRACT

Increasing Labor Productivity in Micro, Small and Medium Enterprises, various MSME businesses is a program carried out by the Department of Manpower and Transmigration which consists of various types of businesses, such as culinary businesses, to manufacturing. However, in line with the development of the government's economic policy, MSMEs are currently faced with free competition from national to international scale companies. With the hope of being able to improve the economy in Pekanbaru City

The purpose of this research is to find out the implementation of the Program for Increasing Labor Productivity in Micro, Small and Medium Enterprises in Pekanbaru City in 2018 and want to know the inhibiting factors in the implementation of this program. This study uses a qualitative approach with a descriptive method. In collecting data, the author uses interview techniques, mass media, and documentation.

The results of this study found that there are three elements called the conformity model, namely the program, program implementers, and program targets. In the first element, the alignment of the Workforce Productivity Improvement Program in Pekanbaru City with the needs of the program target, namely business actors where this program is designed and adapted to the acceleration of the regional economy. In the second element, the Program Implementer, namely the management of the implementation of the alignment of the Workforce Productivity Improvement Program in this case is not optimal, the program implementer is still lacking in related instructors. In the third element, in this case the business actors themselves as the target of the program, there are still many who do not have complete data and business permits as the main requirements for program recipients. There are still inhibiting factors in this program, both external and internal, making the implementation of the program to increase labor productivity in Pekanbaru City cannot be realized optimally.

Keywords: Increasing Labor Productivity, Programs, Program Implementation, Program Targets.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional dalam bidang ekonomi di Indonesia diarahkan pada Pancasila sebagai dasar negara, terutama pada sila kelima yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pengamalan sila kelima antara lain mencakup upaya untuk mengembangkan perekonomian dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dikaitkan dengan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju pada terciptanya kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam suatu sistem ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan.

Pembangunan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata dan terukur dalam rangka peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, ketenangan berusaha dan kesejahteraan transmigrasi. Upaya peningkatan daya saing bidang ketenagakerjaan diarahkan untuk mendorong terciptanya kesempatan kerja yang layak yaitu lapangan kerja produktif dengan perlindungan dan jaminan sosial yang memadai, mendorong terciptanya kesempatan kerja yang seluas – luasnya dan merata dalam sektor – sektor pembangunan.

Salah satu bentuk pembangunan yang di gagas pemerintah dalam meningkatkan perekonomian Indonesia salah satunya dengan mengembangkan Usaha mikro kecil dan menengah yang ada di setiap daerah. Dalam perkembangan dunia usaha, pengembangan ketenagakerjaan Usaha Kecil dan Menengah ataupun

Dengan berkembangnya industrialisasi dan globalisasi yang ditandai dengan pesatnya pembangunan di segala bidang dengan memanfaatkan ilmu dan teknologi serta meningkatnya jumlah tenaga kerja, sehingga masalah

hubungan industrial, kesejahteraan serta perlindungan terhadap tenaga kerja masih mewarnai masalah ketenagakerjaan di Provinsi Riau. Masih rendahnya produktivitas tenaga kerja yang berakibat pada rendahnya pendapatan dan menyebabkan pekerja jatuh kepada garis kemiskinan. Dimana kemiskinan tersebut berawal dari :

- Tidak memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pendidikan
- Tidak mempunyai penghasilan yang layak
- Tidak mempunyai pekerjaan
- Tidak mempunyai keterampilan dan keahlian

Kondisi ini tentu saja menjadikan setiap pekerja UMKM yang ada di Kota Pekanbaru harus memiliki produktivitas bagus, agar mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing, maupun lokal. Pada saat ini, Pekanbaru sendiri memiliki jumlah UMKM sebanyak 15686 pada tahun 2018.

Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

-Mengetahui pelaksanaan program peningkatan produktivitas Tenaga Kerja Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau di Kota Pekanbaru.

-Mengetahui hambatan dalam pelaksanaan program peningkatan produktivitas Tenaga Kerja Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau di Kota Pekanbaru.

Manfaat Penelitian

-Untuk kepentingan teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur kajian mengenai dampak adanya program dalam peningkatan produktivitas Tenaga Kerja Pada UMKM.

-Untuk pemerintah hasil penelitian ini dapat diharapkan memberikan manfaat

membantu pemerintah mengetahui masalah-masalah yang terjadi jika pemerintah lalai dan melakukan pembinaan terhadap produktivitas Tenaga Kerja Pada UMKM di Kota Pekanbaru.

-Untuk masyarakat hasil penelitian ini akan dapat memberikan pengetahuan tentang pentingnya pelaksanaan Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dalam meningkatkan produktivitas Tenaga Kerja Pada UMKM di Kota Pekanbaru.

-Menambah pengetahuan serta pengalaman penulis tentang pelaksanaan program dalam meningkatkan produktivitas Tenaga Kerja Pada UMKM oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau di Kota Pekanbaru.

Kerangka Teori

-Teori Implementasi Program

Salah satu model implementasi program yakni model yang diungkapkan oleh David C. Korten. Model ini memakai pendekatan proses pembelajaran dan lebih dikenal dengan model kesesuaian implementasi program. Model kesesuaian Korten

Kerangka Berpikir

Berdasarkan dari teori-teori yang telah diuraikan pada studi kepustakaan diatas, maka dapatlah dibuat suatu kerangka pemikiran tentang Pelaksanaan Program peningkatan produktivitas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau di Kota Pekanbaru Tahun 2018

Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan salah satu kerangka untuk memudahkan peneliti dalam menjelaskan berbagai konsep yang akan dioperasionalkan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

a. Program

Program merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa

harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait, untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Biasanya suatu program mencakup seluruh kegiatan yang berada di bawah unit administrasi yang sama, atau sasaran-sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi, yang semuanya harus dilaksanakan secara bersamaan atau berurutan.

b. Pelaksanaan Program adalah serangkaian kegiatan yang didukung prosedur untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

c. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesainya masa hubungan kerja. Tenaga kerja adalah objek, yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa, untuk kebutuhan sendiri dan orang lain.

d. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,00 (belum termasuk tanah dan bangunan) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.¹UMKM ini bergerak dalam hal perdagangan dimana dalam hal ini menyangkut pada aktivitas atau kegiatan berwirausaha.

e. Komunikasi

Komunikasi yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus

¹ Akifa P. Nayla, 2014, *Komplet Akuntansi untuk UKM dan Waralaba*, Laksana, Jogjakarta, hal.12.

dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group)².

f. Sumberdaya

Sumberdaya yaitu suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan yang dapat berupa sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial³.

g. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis⁴.

h. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi merupakan struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan dalam bentuk Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi⁵.

Metode Penelitian

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Sanapiah Faisal, pendekatan kualitatif fokusnya pada penunjukan makna, deskripsi, penjernihan dan penempatan data pada konteksnya masing-masing, dan seringkali melukiskannya didalam kata-kata dari pada didalam angka-angka.⁶

² A.G, Subarsono, 2013, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Praktik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Algifari. Hal: 90.

³A.G, Subarsono, 2013, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Praktik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Algifari. Hal: 90

⁴A.G, Subarsono, 2013, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Praktik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Algifari. Hal: 90

⁵A.G, Subarsono, 2013, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Praktik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Algifari. Hal: 90

⁶Faisal, Sanapiah. 2010, *Format-Format Penelitian Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.hlm 256

Kemudian jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain deskriptif kualitatif. Menurut Sanapiah Faisal merupakan eksplorasi dan klarifikasi mengenai sesuatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.⁷ Menurut Burhan Bungin (Ed.) format desain deskriptif kualitatif banyak memiliki kesamaan dengan desain deskriptif kuantitatif, karena itu desain deskriptif kualitatif bisa disebut pula kuasi kualitatif atau desain kualitatif semu.⁸ Artinya, desain ini belum benar-benar kualitatif, terutama dalam menempatkan teori pada data yang diperoleh. Desain deskriptif kualitatif ini memungkinkan penulis mengkaji lebih mendalam mengenai upaya peningkatan produktivitas UMKM oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau di Kota Pekanbaru Tahun 2018.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, hal ini berangkat dari pemikiran bahwa instansi tersebut mempunyai wewenang dalam peningkatan UMKM Provinsi Riau di Kota Pekanbaru.

Jenis Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini, yaitu data yang diperoleh dari sumber lapangan yang meliputi data diberikan oleh informan yang menjadi objek penelitian berupa informasi yang relevan dengan masalah-masalah dan

⁷Faisal, Sanapiah. 2010, *Format-Format Penelitian Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.hlm 20

⁸ Bungin (Ed.), Burhan. 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.hlm 61

dirumuskan dalam penelitian melalui proses wawancara yaitu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, Kasi Pelatihan, Pemagangan dan Produktivitas Tenaga Kerja, Staf Seksi Lattas dan Peserta Pelatihan UMKM.

b. Data Sekunder

James A. Black dan Dean J. Champion Data sekunder merupakan sumber data yang tidak dibatasi ruang dan waktu. Adapun Data Sekunder dalam penelitian ini, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan penulis untuk melengkapi data primer.⁹ Penulis memperoleh data sekunder dari literatur pustaka, artikel, jurnal, serta data yang diperoleh dari dokumentasi yang dibutuhkan, yaitu data dari kantor yang bersangkutan dan berhubungan dengan masalah penelitian ini dan juga bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti:

- 1) Gambaran Umum Pelaksanaan Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau di Kota Pekanbaru.
- 2) Data UMKM yang mengikuti pelatihan tahun 2018 di Kota Pekanbaru.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian mengenai Pelaksanaan Program Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau di Kota Pekanbaru Tahun 2018 bersumber dari:

- Informan
Informan penelitian adalah orang yang menjadi sumber data di dalam penelitian yang berhubungan langsung dengan permasalahan dan mampu memberikan informasi

yang akurat kepada peneliti. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling technique adalah cara penentuan sejumlah informan sebelum penelitian dilaksanakan dengan menyebutkan secara jelas siapa yang dijadikan informan serta informasi apa yang diinginkan dari masing-masing informan tersebut.

Dalam teknik purposive sampling didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut erat dengan informan yang sudah diketahui sebelumnya, dengan kata lain, unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu dan informan yang dapat membantu dalam melakukan tujuan penelitian. Adapun informasi dalam penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

- Dokumen

Dokumen adalah sesuatu yang tertulis atau tercetak dan segala benda yang mempunyai keterangan-keterangan dipilih untuk dikumpulkan, disusun, disediakan atau untuk disebarkan. Dokumen berupa teks yang diperoleh secara resmi seperti Peraturan Perundang-Undangan, peninggalan tertulis, arsip-arsip, buku, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian tentang Pelaksanaan Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Dalam Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Kota Pekanbaru

⁹James, A Black. dan Dean, J Champion. 2009, *Metode & Masalah Penelitian Sosial*, Refika Aditama, Bandung.hlm 348

Tahun 2018 diperoleh melalui pengumpulan data dan informasi melalui:

- a) Wawancara
Teknik wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian, cara ini digunakan untuk mendapatkan informasi dan data dari informan dengan cara bertanya langsung secara tatap muka. Dalam penelitian ini, peneliti mempersiapkan pertanyaan yang ditujukan untuk informan berkenaan dengan tujuan informasi yang akan dicapai.
- b) Dokumentasi
Dokumentasi yaitu data yang penulis peroleh dari arsip data yang relevan seperti data ilmiah, berita online, jurnal yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan. Burhan Bungin (Ed.) perlu diupayakan untuk memahami suatu objek atau kasus tertentu berdasarkan pada gambaran situasi sosial pada waktu kasus itu muncul dan gambaran reaksi sosial terhadap kasus tersebut. Untuk itu penulis mengambil data-data yang bersumber dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dalam Peningkatan Produktivitas UMKM Provinsi Riau di Kota Pekanbaru yang berkaitan dengan aspek-aspek yang penulis teliti.

Teknik Analisis Data

Sesuai dengan jenis penelitiannya, maka penelitian ini juga menggunakan analisis data kualitatif. Prosesnya adalah seluruh data yang diperoleh penulis baik dari wawancara maupun penelusuran dokumen, kemudian dianalisis baris demi baris

serta dicari intisari dari data tersebut sampai memungkinkan untuk diambil sebuah kesimpulan mengenai pelaksanaan program Peningkatan UMKM oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Riau di Kota Pekanbaru Tahun 2018.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam pembahasan bab ini penulis akan menyajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai bagaimana Pelaksanaan Program Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau di Kota Pekanbaru Tahun 2018 dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Pelaksanaan Program Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau di Kota Pekanbaru Tahun 2018. Dalam penulisan ini penulis menggunakan kajian teori David C. Korten tentang tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan Program yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran program.

1. Program Peningkatan Tenaga Kerja Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Di Kota Pekanbaru Tahun 2018

Dalam setiap program, tentu terdapat tahapan-tahapan pelaksanaan agar program yang di jalankan terkontrol dan pada klimaksnya dapat mencapai tujuan yang direncanakan. Pada tahapan program, terdapat tahapan implementasi atau yang biasa disebut pelaksanaan. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah

rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Tahap ini merupakan proses paling krusial dimana menentukan keberhasilan suatu program karena baik buruk program ditentukan oleh persiapan dan perencanaan yang baik agar tujuan program dapat tercapai. Untuk itu, dalam bagian ini peneliti akan menggambarkan proses implementasi Program Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan mengkaitkannya kedalam model implementasi menurut David C.Korten. salah satu model implementasi program yakni model yang diungkapkan oleh David C. Korten. Model ini memakai pendekatan proses pembelajaran dan lebih dikenal dengan model kesesuaian implementasi program. Korten menggambarkan model ini berintikan tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran program. Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. Pertama, Kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Kedua, Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, Kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program.

-ElemenProgram

Pada elemen pertama, kesesuaian program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran adalah faktor

penting pertama bagi Korten. Keselarasan program dengan kebutuhan sasaran program mutlak dikedepankan karena berpengaruh secara langsung terhadap kebermanfaatan yang akan diperoleh oleh sasaran program. Apabila program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, maka dapat dipastikan bahwa hasil program tidak memberikan manfaat dan tidak memberdayakan masyarakat

Pengembangan UKM/Usaha Kecil dan Menengah merupakan usaha yang bercirikan kerakyatan memberikan peluang yang besar untuk merekrut sumberdaya disekitarnya, terutama UKM yang bergerak dibidang kuliner. Usaha kuliner pada saat ini merupakan salah satu UKM yang mendukung APBD di setiap daerah Selain itu, pengembangan UKM ataupun usaha Mikro akan lebih mampu untuk bertahan terhadap adanya gejolak perubahan baik ekonomi nasional maupun dalam skala internasional.

Untuk mengetahui suatu program itu sudah baik, harus memuat beberapa aspek diantaranya adalah :

-Adanya tujuan yang ingin dicapai secara jelas dan kebijakan- kebijakan yang diambil dalam mencapaitujuan.

Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tentunya tidak terlepas dari kemampuan dan keterampilan kebijakan aparat pemerintah setempat dengan berbagai upaya dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, sehingga potensi UMKM dapat meningkatkan.. Kebijakan Produktivitas UMKM merupakan suatu tugas penting yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau yang diatur dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,

Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.

Adanya strategi yang digunakan

Pada umumnya sebuah program, Pelaksanaan . Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau melalui tahap perencanaan terlebih dahulu.

Berikut wawancara bersama Ibuk Ir Hj. Zalar, Kepala Seksi Pelatihan, Pemagangan dan Produktivitas Tenaga Kerja Disnakertrans Provinsi Riau, beliau mengungkapkan:

“Ada pun strategi yang digunakan dalam pelaksanaan Program Meningkatkan Keterampilan Dan Produktivitas Tenaga Kerja di Kota Pekanbaru telah tertuang didalam RENJA dimana salah satunya adalah Pelatihan yang kita laksanakan setiap tahunnya”(**Wawancara 5 April 2021**)

Berdasarkan wawancara diatas bahwa dalam program Meningkatkan Keterampilan Dan Produktivitas Tenaga Kerja di Kota Pekanbaru ada beberapa strategi yang diperlukan yang terdapat dalam RENJA Disnakertrans Provinsi Riau.

Elemen Pelaksanaan Program

Pada elemen kedua, Korten menekankan kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana. Artinya, kesesuaian antara tugas yang dibebankan dengan kemampuan organisasi pelaksana harus dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja adalah terlaksananya kegiatan Pelatihan kewirausahaan, AMT dan Produktivitas, Penyuluhan dan bimbingan teknis konsultasi produktivitas, Pendidikan dan pelatihan ketrampilan (Pelatihan Institusional, Pelatihan Non Institusional,

Pelatihan Berbasis, Pelatihan Berbasis Masyarakat) telah memberikan kontribusi untuk mengembangkan perekonomian dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dikaitkan dengan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju pada terciptanya kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dinilai dari tugas Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Provinsi Riau.

Disposisi (Sikap Pelaksana)

Disposisi merupakan salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi program yang efektif. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif dan adanya dukungan terhadap implementasi program maka kemungkinan besar implementasi program akan dapat terlaksana sesuai keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala atau hambatan.

Faktor keberhasilan pelaksanaan program bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan oleh kemauan para pelaku kebijakan tapi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan. Setiap kebijakan atau program pemerintah tidak akan berhasil tanpa dukungan atau sikap penerimaan oleh para pelaksana, dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan atau program yang telah ditetapkan.

Program Meningkatkan Keterampilan Dan Produktivitas Tenaga Kerja di Kota Pekanbaru yang dilaksanakan Oleh Disnakertrans Provinsi Riau belum terlaksana dengan baik sehingga mengakibatkan masih tingginya angka Pengangguran di Provinsi Riau. Melihat

keadaan tersebut perlu adanya kebijakan yang lebih terarah oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dalam Meningkatkan Keterampilan Dan Produktivitas Tenaga Kerja di Kota Pekanbaru.

bersama Ibuk Ir Hj. Zalar, Kepala Seksi Pelatihan, Pemagangan dan Produktivitas Tenaga Kerja Disnakertrans Provinsi Riau dalam Meningkatkan Keterampilan Dan Produktivitas Tenaga Kerja di Kota Pekanbaru :

“Sejauh ini pelaksanaan Meningkatkan Keterampilan Dan Produktivitas Tenaga Kerja di Kota Pekanbaru melakukan kerjasama antar atasan dengan bawahan agar tercapainya pelaksanaan Peningkatan Keterampilan Dan Produktivitas Tenaga Kerja, begitu juga kami melakukan kerjasama antar instansi yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau sebagai pihak yang memiliki data terkait UMKM yang ada di provinsi Riau Terutama Di Kota Pekanbaru sehingga program ini tepat sasaran dan diterima oleh banyak pihak dan secara luas.” (Wawancara:5 april 2021)

Berdasarkan wawancara diketahui bahwa Pelaksanaan Tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dalam Program Meningkatkan Keterampilan Dan Produktivitas Tenaga Kerja di Kota Pekanbaru dimana kurang maksimalnya kerjasama dengan instansi terkait sehingga dapat dilihat bahwa masih belum terpecahkannya masalah pengangguran di kota Pekanbaru.

Diperkuat oleh wawancara Ibuk Ir Hj. Zalar, Kepala Seksi Pelatihan, Pemagangan dan Produktivitas Tenaga Kerja Disnakertrans Provinsi Riau dalam Meningkatkan Keterampilan Dan Produktivitas Tenaga Kerja di Kota Pekanbaru:

“Sejauh ini kami sudah semaksimal mungkin dalam pelaksanaan program

tersebut, hanya saja banyak pelaku usaha UMKM yang belum memiliki izin usaha dan syarat-syarat lain sehingga masih banyak pelaku UMKM yang belum bisa dimaksimalkan atau tidak bisa ikut pelatihan peningkatan produktivitas tenaga kerja karena syarat-syarat ini. Jadi data UMKM yang kita dapat di Dinas terkait tersebut, baru kita bisa memilah kembali usaha mana yang bisa di ikutkan sebagai peserta. Hal ini juga dikarenakan kurangnya anggaran dalam pengembangannya tetapi kami selalu berusaha memaksimalkan yang ada.” (Wawancara:5 April 2021).

Dari hasil wawancara diketahui bahwa Pelaksanaan Tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dalam Program Meningkatkan Keterampilan Dan Produktivitas Tenaga Kerja di Kota Pekanbaru bahwa pelaksanaan Program Pelatihan ini dinilai belum terlaksana dengan baik mulai dari terbatasnya peserta yang disebabkan oleh anggaran, juga minimnya Usaha -usaha yang belum terdata di Dinas terkait karena belum memiliki izin atau syarat-syarat lain sehingga program ini belum optimal.

Berdasarkan RENJA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Permasalahan utama Ketenagakerjaan yang masih dihadapi Provinsi Riau Terutama Kota Pekanbaru antara lain disebabkan karena:

Rendahnya kualitas tenaga kerja dan terbatasnya sarana prasarana pelatihan di UPT PK/BLK

Belum maksimalnya optimalisasi fungsi balai terkait serta kurangnya peran masyarakat dalam peran aktif meningkatkan produktivitas

Kurang selarasnya kebijakan ketenagakerjaan pusat dengan kebijakan/peraturan daerah, masih lemahnya lembaga hubungan industrial, terbatasnya SDM tertentu bidang Ketenagakerjaan (Instruktur, Pengantar

Kerja, Mediator, dan pengawas ketenagakerjaan)

Program Meningkatkan Keterampilan Dan Produktivitas Tenaga Kerja di Kota Pekanbaru tentunya tidak terlepas dari kemampuhan keterampilan kebijakan aparat pemerintahan setempat dengan berbagai upaya dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, sehingga potensi peningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja di kota pekanbaru dapat berjalan dengan baik. Program ini Merupakan suatu tugas yang penting yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, untuk lebih jelasnya dapat dilihat susunan tugas pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau yang mana terdiri dari:

- a. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 - b. Sekretariat, .
 - c. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja.
 - d. Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja, terdiri atas:
 - e. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri atas:
 - f. Bidang Ketransmigrasian terdiri atas:
 - g. UPT Latihan Kerja (UPT – LK)
 - h. UPT Balai Latihan Transmigrasi
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional
- Berdasarkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Riau, pasal 3 menyebutkan bahwa Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja, Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, dan Bidang Ketransmigrasian;
- b. Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja, Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, dan Bidang Ketransmigrasian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja, Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, dan Bidang Ketransmigrasian;
- d. Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja, Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, dan Bidang Ketransmigrasian; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

Secara khusus peran peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja di Pekanbaru yaitu peran Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Riau adalah Seksi Pelatihan, Pemagangan dan Produktivitas Tenaga Kerja dimana tugas Seksi Pelatihan, Pemagangan dan Produktivitas Tenaga Kerja.

Program Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan sasaran programnya meningkatkan Keterampilan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan indikator programnya Jumlah Tenaga Kerja yang siap Bekerja

sesuai dengan Komptensinya. Dalam program ini kegiatan sebagai berikut :

-Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada seksi pelatihan dan, pemagangan dan produktivitas tenaga kerja

-Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi pelatihan, pemagangan dan produktivitas tenaga kerja

-Merencanakan program pengembangan pelatihan baik berbasis kompetensi maupun pelatihan berbasis masyarakat;

- a. Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja
- b. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kependidikan dan Instruktur di BLK
- c. **Pelatihan Kewirausahaan, AMT Dan Produktivitas.**
- d. Pelatihan Pemagangan Dalam Negeri
- e. Penyuluhan Dan Bimbingan Teknis Konsultasi Produktivitas.
- f. Pendidikan Dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja Pada UPT Wilayah I
- g. Pendidikan Dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja Pada UPT Wilayah II
- h. Pendidikan Dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja Pada UPT Wilayah III
- i. Pembentukan Badan Koordinasi dan Sertifikasi (BKSP) Provinsi Riau
- j. Pelatihan Sertifikasi Uji Komptensi
- k. Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Riau sebagai pelaksanaan Program Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan sasaran programnya meningkatkan Keterampilan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, bahwa masih banyak UMKM yang harus mendapat pelatihan ini, tentu untuk memacu perkembangan Perekonomian dan jawaban atas

tingginya tingkat pengangguran di Pekanbaru serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah selain itu juga diketahui bahwa sektor UMKM ini juga bisa lebih mendorong kemampuan daerah dalam kuat di sektor Ekonomi.

Pengaturan Birokrasi

Pelaksanaan suatu program akan berhasil apabila dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya. Untuk mencapai keberhasilan diperlukan pengaturan birokrasi yang sesuai dalam melaksanakan Program Peningkatan Produktivitas Tenaga kerja di Pekanbaru. Dalam program Program Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan sasaran programnya meningkatkan Keterampilan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja yang merupakan tugas dari Seksi Pelatihan, Pemagangan dan Produktivitas Tenaga Kerja dimana mereka bertanggung jawab dalam berjalannya program yang sudah ditentukan.

Berdasarkan penjelasan yang sudah disampaikan bahwa penetapan untuk menjadi Penanggung jawab program Program Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dilakukan dengan memberikan pembekalan dan pelatihan yang sudah terverifikasi kepada para UMKM. Ini dilakukan agar fasilitator memenuhi unsur kelayakan dalam memahami dan menyampaikan program dengan baik nantinya kepada sasaran program.

-Faktor-Faktor Mempengaruhi Program Peningkatan Produktivitas Tenaga kerja di Pekanbaru

-Faktor Internal

-Terbatasnya Anggaran

-Keterbatasan Tenaga Pelatih atau Instruktur dalam Peningkatan Produktivitas Tenaga kerja di Kota Pekanbaru

Faktor Eksternal

-Partisipasi Pelaku usaha

Partisipasi Pelaku Usaha atau UMKM yang ada merupakan salah satu faktor kunci dalam keberlanjutan dan peningkatan produktivitas usaha Ekonomi di Kota Pekanbaru. Melalui pelibatan Pelaku usaha atau UMKM secara langsung

akan masyarakat akan merasakan dampak langsung perekonomian di Kota Pekanbaru. Partisipasi Berbentuk ide dan peran aktif mereka dalam pendataan usaha dan kelengkapan data izin usaha dalam peran di Ekonomi Masyarakat.

Partisipasi pelaku usaha di dalam peningkatan ekonomi masyarakat melalui Peningkatan Produktivitas Tenaga kerja di Kota Pekanbaru masih kurang, ini dikarenakan suatu hal yang wajib bagi sebuah usaha untuk memiliki izin dan kelengkapan data lain sebelum bisa dipilih dalam mengikuti program Peningkatan Produktivitas Tenaga kerja di Kota Pekanbaru ini .

Partisipasi pelaku usaha sangat dibutuhkan karena itu adalah modal dasar sebagai mesin penggerak peningkatan perekonomian yang di tuju, oleh sebab itu masyarakat dan pelaku usaha seharusnya menjadi hal penting, akan tetapi dukungan pemerintah juga sangat diperlukan dalam Peningkatan Produktivitas Tenaga kerja di Kota Pekanbaru, oleh karena itu antara pelaku usaha dan pemerintah seharusnya mempunyai tujuan yang sama agar setiap kegiatan yang dilaksanakan bisa tercapai secara optimal.

Dukungan Lintas Sektor dalam

Pelaksanaan Program belum optimal

Keberhasilan Program Peningkatan Produktivitas Tenaga kerja di Kota Pekanbaru dilihat dari keterlibatan dan dukungan lintas sektoral yang ada baik pemerintah maupun pihak lain

Dukungan lintas sektor sangat diharapkan dalam Program peningkatan

Produktivitas Tenaga kerja di Kota Pekanbaru, hal ini tentunya menjadi salah strategi dalam mempercepat pencapaian tujuan dari program tersebut.

Program Peningkatan Produktivitas Tenaga kerja di Kota Pekanbaru merupakan program yang bersifat lintas sektoral, maka diperlukan koordinasi dan penajaman program serta kegiatan pembangunan yang intensif antara semua instansi terkait. Karena kunci penentu kesuksesan program tersebut adalah koordinasi semua pihak baik pemerintah, pelaku usaha maupun masyarakat

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan tentang pelaksanaan Program peningkatan Produktivitas Tenaga kerja di Kota Pekanbaru, maka didapati kesimpulan sebagai berikut :

-Keberhasilan implementasi program harus meliputi tiga elemen yang disebut dengan model kesesuaian menurut David C.Korten. Pada elemen pertama, keselarasan Program peningkatan Produktivitas Tenaga kerja di Kota Pekanbaru dengan kebutuhan sasaran program yaitu pelaku usaha dimana program ini dirancang dan disesuaikan dengan percepatan perekonomian wilayah tersebut. Pada elemen kedua, Pelaksana Program yaitu pengurus pelaksanaan keselarasan Program peningkatan Produktivitas Tenaga kerja dalam hal ini belum optimal, pelaksana program masih minimnya tenaga Instruktur yang terkait. Pada Elemen ketiga dalam hal ini pelaku usaha itu sendiri sebagai sasaran program masih banyak yang belum memiliki kelengkapan data dan izin usaha sebagai syarat utama penerima program.

Adapun faktor-faktor yang menghambat Pelaksanaan keselarasan Program peningkatan Produktivitas Tenaga kerja

dapat dilihat dari Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Faktor Internal yang mempengaruhi dalam pelaksanaan program ini yaitu sangat minimnya anggaran yang direalisasikan pemerintah daerah terhadap pengembangan keselarasan Program Peningkatan Produktivitas Tenaga kerja di kota Pekanbaru sehingga program yang dilakukan berjalan tidak optimal dan terbatasnya instruktur yang memiliki sertifikasi. Faktor Eksternal yang mempengaruhi dalam Pelaksanaan Program Peningkatan Produktivitas Tenaga kerja di Pekanbaru yaitu masih kurangnya partisipasi pelaku usaha atau UMKM. Berikutnya dukungan lintas sektor dalam pelaksanaan program ini dinilai belum optimal yaitu terkait pendataan pelaku UMKM.

Saran

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian di lapangan, penulis ingin memberikan saran terkait dengan masalah yang terjadi, sebagai berikut :

- a. Kepada pemerintah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau dalam setiap pelaksanaan program dan pengelola program dan masyarakat dalam hal ini pelaku usaha dapat saling berkoordinasi dengan baik.
- b. Kepada Pelaku Usaha di Kota Pekanbaru harus turut berpartisipasi lebih aktif lagi dalam memebri informasi dan mendaftarkan usaha mereka sehingga terdata. Agar tercapainya tujuan dari program yang dilakukan secara terarah, terpadu, terencana dan tepat sasaran, serta diperlukan program yang bersifat berkelanjutan agar meningkatnya perekonomian dan mampu menurunkan pengangguran di kota Pekanbaru

DAFTAR PUSTAKA

- A.G, Subarsono, 2013, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Praktik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Algifari.
- Abdul Hamid Mursi, 2006, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Bumi Aksara,
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Budi Winarno, 2014, *Kebijakan Public : Teori, Proses, dan Studi Kasus*, Yogyakarta: CAPS
- Bungin (Ed.), Burhan. 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Faisal, Sanapiah. 2010, *Format-Format Penelitian Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Firman Zajuli, 2015, *Analisis Implementasi Konsep 5 S untuk Meningkatkan Kinerja Karyawan (Studi Kasus di PT. Muliamakmur Elektrikatama, Cikarang)*. Fakultas Bisnis President University. Bekasi.
- Haedar Akib dan Antorius Tarigan, 2008, *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model Dan Kriteria Pengukurannya*, Jurnal Kebijakan Publik.
- Hamid Patilima. 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta,
- HB Sutopo. 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: UNS Press,
- Imai, Masaki. 2005. *Budaya Kaizen*, Jakarta : Pustaka Utama.
- Islamy, Irfan M. 2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Cetakan ke-15. Jakarta: Bumi Aksara.

- James, A Black. dan Dean, J Champion. 2009, *Metode & Masalah Penelitian Sosial*, Refika Aditama, Bandung
- Juznia Andriani, 2019, Penerapan Konsep 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke) di Kid Corner PUSTAKA, LIBRARIA Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi p-ISSN: 2088-7310; e-ISSN: 2614-3534 Vol.8, No.2, Tahun 2019; h. 25-48
- Joseph M. Putti, 2010, *Mamahami Produktivitas*, Tangerang, Binarupa Aksara,
- Pramono, Wishnu Arief, ST. 2008. *Meraup Keuntungan Dengan Lean Manufacturing*, Jakarta : PT.Elex Media Komputindo.
- Siagian,P. Sondang, 2008, *Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan Strateginya*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses Edisi Revisi*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Wiryanto, Pemilik Suar Coffe, wawancara pada 18 Juni 2020
- Yusri Munaf, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Pekanbaru, Marpoyan Tujuh,
- Zalimar, <https://www.halloriau.com/read-otonomi-120952-2019-10-23-bina-10-ukm-dengan-program-5s-disnakertrans-riau-berharap-tambahan-kucuran-dana.html>. Akses 21 Juni 2020, 15.30 Wib